

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DISKUSI STUDI KASUS (DSK)-1
BS. EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA BLOK I
DISKUSI STUDI KASUS (DSK)

PENCEGAHAN TINDAKAN INTOLERAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Oleh:

NAMA : PROF. MUHAMMAD SIDDIQ, M.H., Ph.D
NOMOR PESERTA : 64
KELOMPOK : i

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA LXVII)
LEMHANNAS RI
TAHUN 2024

1. Pendahuluan

Pengenalan intoleransi dalam kehidupan bernegara menjadi diskusi serius yang membahayakan keamanan dan keberagaman masyarakat. Pencegahan tindakan intoleran merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai latar belakang permasalahan intoleransi menjadi kunci dalam upaya pencegahan yang efektif.

Dalam konteks pencegahan tindakan intoleran mencakup analisis mendalam terhadap kondisi sosial, politik, agama dan budaya yang menjadi pendorong munculnya intoleransi. Dengan memahami akar permasalahan, upaya pencegahan dapat lebih terarah dan efektif, sehingga meminimalkan potensi konflik dan ketegangan antar kelompok masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Konsep intoleran merujuk pada sikap atau perilaku yang tidak mengakui atau menerima perbedaan, baik dalam hal agama, suku, ras, maupun pandangan politik. Intoleran juga dapat terlihat dalam bentuk penolakan terhadap kebebasan beragama, ekspresi, serta penggunaan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, konsep intoleran mencakup segala bentuk sikap tidak toleran terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat.¹

Definisi intoleran mencakup penolakan terhadap keberagaman dan perbedaan, serta sikap tidak menerima pandangan atau keyakinan yang berbeda dengan yang dimiliki sendiri. Karakteristik intoleran meliputi sikap tertutup, tidak mau berdialog, memiliki prasangka negatif terhadap kelompok tertentu, dan cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menekan atau menghilangkan keberagaman tersebut. Dengan memahami definisi dan karakteristik intoleran, masyarakat dapat lebih siap untuk mencegah dan mengatasi perilaku intoleran dalam kehidupan bernegara.²

¹ Yuliarni, Yuliarni. "Kilas Balik Sejarah, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Isu Intoleransi." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7.2 (2022): 86-94.

²Rijaal, M. Ardini Khaerun. "Fenomena intoleransi antar umat beragama serta peran sosial media akun instagram jaringan gusdurian indonesia dalam menyampaikan pesan toleransi." *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.2 (2021): 101-114.

2. Pembahasan

2.1. Tindakan Intoleran

Tindakan intoleran memiliki dampak yang sangat serius bagi kehidupan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari terjadinya kerusuhan antar kelompok masyarakat akibat tindakan intoleran. Selain itu, dapat pula terjadi pemisahan antar kelompok berdasarkan agama, etnis, dan keyakinan yang pada akhirnya berujung pada pengurangan rasa persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat.

Dampak sosial dari tindakan intoleran sangatlah signifikan. Hal ini terlihat dari terjadinya pembatasan interaksi antar kelompok masyarakat akibat intoleran.³ Adanya diskriminasi, perlakuan tidak adil, dan ketegangan antar kelompok dapat membuat terganggunya hubungan sosial yang harmonis di dalam masyarakat. Dampak sosial tersebut juga dapat berujung pada berkurangnya keragaman budaya dan kearifan lokal yang merupakan kekayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencegah tindakan intoleran dalam kehidupan bernegara agar kerukunan sosial tetap terjaga.

Pentingnya pencegahan intoleran tidak bisa diremehkan dalam kehidupan bernegara, mengingat dampak negatif yang bisa ditimbulkannya. Tindakan intoleran dapat menyebabkan konflik antar kelompok masyarakat, memicu ketegangan sosial, dan bahkan dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, pencegahan intoleran menjadi penting guna memastikan perdamaian dan harmoni dalam kehidupan bernegara, serta untuk memastikan terbangunnya masyarakat yang inklusif dan adil untuk semua individu dan kelompok.

2.2. Implikasi Intolerann bagi Kehidupan Bernegara

³Kusuma, Rafles Abdi. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perilaku intoleransi dan antisosial di Indonesia." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10.2 (2019): 273-290.

Implikasi tindakan intoleran bagi kehidupan bernegara sangatlah besar dan serius. Tindakan intoleran dapat menghambat pembangunan ekonomi, mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri, dan merusak citra negara di mata masyarakat internasional. Lebih dari itu, tindakan intoleran dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Maka dari itu, pencegahan intoleran sangat penting untuk menjaga kedamaian dan kestabilan kehidupan bernegara.⁴

Pilar utama dalam pencegahan tindakan intoleran adalah menjaga keberagaman dan meningkatkan pemahaman antaragama melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal maupun informal, diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki sikap menghargai perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu intoleran. Selain itu, penguatan kesadaran masyarakat melalui kampanye, workshop, dan kegiatan sosial juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menjaga kerukunan antar umat beragama.⁵

Upaya pencegahan tindakan intoleran melalui pendidikan dapat dilakukan melalui penyusunan kurikulum yang memasukkan pembelajaran tentang toleransi, kerukunan, dan pluralisme. Sekolah menjadi wadah penting untuk mengenalkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. Selain itu, pendidikan informal seperti kegiatan keagamaan, pengajian, dan ceramah agama juga dapat dimanfaatkan untuk menanamkan sikap saling menghormati di antara umat beragama. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui promosi nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui media massa maupun kegiatan keagamaan yang inklusif.⁶

⁴Budiman, Agus, Otong Husni Taufiq, and Egi Nurholis. "Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah (Studi Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Periode 2019-2020)." (2022).

⁵Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. "Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Intoleransi." Seminar Nasional Dan Call For Paper Fakultas Hukum. 2019.

⁶Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan agama-agama*. Samudra Biru, 2011. hlm.1-11.

Institusi pemerintah dan non-pemerintah memegang peran penting dalam pencegahan intoleransi dalam kehidupan bernegara. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang mendukung toleransi antar-etnis, agama, dan kepercayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, kebijakan multikulturalisme, serta pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan intoleran. Sementara itu, institusi non-pemerintah seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membangun toleransi melalui kegiatan advokasi, pelatihan, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dan rukun.

Peran pemerintah dalam membangun toleransi sangat signifikan, terutama dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan intoleransi. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendorong inklusi, dialog lintas-agama, serta memberikan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menciptakan program pendidikan multikulturalisme di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan hidup. Upaya pemerintah dalam membangun toleransi juga dapat dilakukan melalui media massa dan kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan keragaman.⁷

Sebagai salah satu negara dengan beragam etnis, agama, dan budaya, Indonesia sering mengalami kasus intoleran yang memperuncing konflik antar masyarakat. Salah satu studi kasus yang relevan adalah insiden penyerangan terhadap tempat ibadah umat beragama, yang seringkali memicu ketegangan sosial. Pencegahan intoleran perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku insiden intoleran, serta penguatan dialog antaragama dan kerjasama antarlembaga di tingkat lokal maupun nasional.

⁷Mewengkang, Gabriela Stefra Sanchia, Ismail Sumampow, and Donald K. Monintja. "Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Langowan Timur." *Jurnal Eksekutif* 3.2 (2023).

Indonesia telah mencatat sejumlah kasus intoleran yang memperlihatkan, mulai dari penghancuran tempat ibadah, penolakan terhadap perbedaan, hingga tindakan kekerasan terhadap minoritas. Salah satu kasus terkenal adalah penyerangan terhadap sejumlah gereja di beberapa daerah, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan umat beragama. Hal ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam pencegahan intoleran, baik melalui pembentukan kebijakan yang inklusif maupun pendekatan sosial budaya yang merangsang toleransi dan kerukunan antar umat beragama.⁸

3. Penutup

Pencegahan intoleran dapat membawa dampak positif secara sosial dan politik. Oleh karena itu, rekomendasi untuk pencegahan intoleran mencakup peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, peran yang lebih aktif dari institusi pemerintah dan non-pemerintah, serta penyusunan kebijakan yang mendukung toleransi dalam masyarakat. Intoleran memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan bernegara, termasuk dampak sosial yang merugikan. Namun, melalui pencegahan tindakan intoleran melalui pendidikan, peran institusi pemerintah dan non-pemerintah, serta kebijakan yang mendukung toleransi, dapat memperbaiki kondisi ini. Studi kasus juga menunjukkan bahwa pencegahan intoleran memainkan peran penting dalam menjaga kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat.

⁸Gusnanda, Gusnanda, and Nuraini Nuraini. "Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 4.1 (2020): 1-14.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Khairil. "Aceh Special Autonomy Fund Oversight System and Its Impact on Corruption Eradication." *INTEGRITY: Journal of Anti-Corruption* 7.1 (2021): 103-104.
- Armia, Muhammad Siddiq, and Muhammad Syauqi Bin-Armia. "Introduction: Form over Substance, Achieving Objectives While Preserving Values." *PETITA* 8 (2023): i.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Clash of Regulations in Autonomous Province: Aceh–Indonesia Case Study." (2021).
- Armia, Muhammad Siddiq. "CONSTITUTIONAL PRACTICE OF ASEAN COUNTRIES: QUESTIONING JUDICIAL REVIEW, RELIGIONS AND MINORITY ISSUES." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 7.1 (2022): 41-60.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Dewan Syariah Aceh Perkuat Qanun Lembaga Keuangan Syariah." *Gema Baiturrahman* 1409.26 (2021): 1-8.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Islamic Constitutionalism Through Constitutional Court: Does it Make Sense?." Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS), Constitutional Court, Religion and Constitutional Rights Protection, 2021.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penelitian Hukum Islam Kontemporer: Isu, Bidang Kajian, dan Pendekatan." (2020).
- Armia, Muhammad Siddiq. QUESTION CAREER PATH ACEH SHARIA POLICE, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 13, No 1 (2023)
- Budiman, Agus, Otong Husni Taufiq, and Egi Nurholis. "Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah (Studi Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Periode 2019-2020)." (2022).
- Gusnanda, Gusnanda, and Nuraini Nuraini. "Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathaniyah dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 4.1 (2020): 1-14.
- Hamzah, Ali, Muhammad Siddiq Armia, and Abdul Jalil Salam. "ORANG TUA SEBAGAI PIHAK KETIGA TERJADINYA PERCERAIAN DI GAYO LUES." *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4.1 (2024): 35-52.
- Kusuma, Rafles Abdi. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perilaku intoleransi dan antisosial di Indonesia." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10.2 (2019): 273-290.
- Mewengkang, Gabrielia Stefra Sanchia, Ismail Sumampow, and Donald K. Monintja. "Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Langowan Timur." *Jurnal Eksekutif* 3.2 (2023).
- Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan agama-agama*. Samudra Biru, 2011. hlm.1-11.

- Rijaal, M. Ardini Khaerun. "Fenomena intoleransi antar umat beragama serta peran sosial media akun instagram jaringan gusdurian indonesia dalam menyampaikan pesan toleransi." *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.2 (2021): 101-114.
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. "Empat Pilar Kebangasaan Sebagai Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Intoleransi." *Seminar Nasional Dan Call For Paper Fakultas Hukum*. 2019.
- Yuliarni, Yuliarni. "Kilas Balik Sejarah, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Isu Intoleransi." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7.2 (2022): 86-94.